

BAB I

PENDAHULUAN

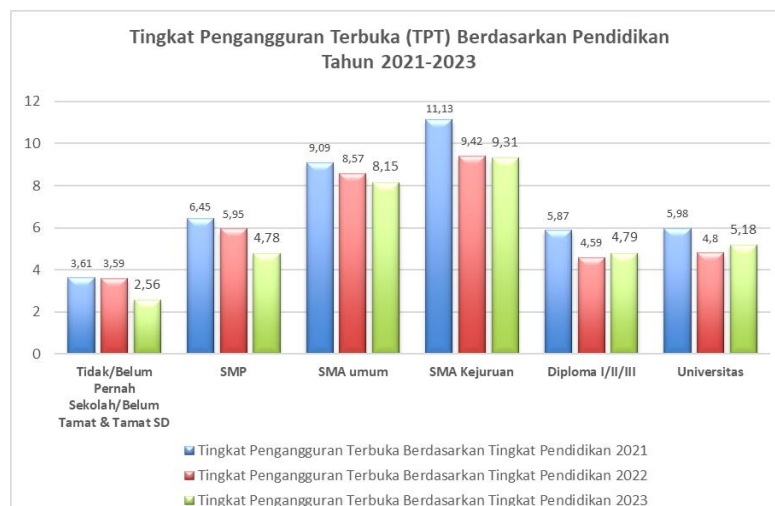
1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dianggap sebagai salah satu investasi yang berharga bagi pembangunan suatu bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disingkat sebagai PBB (*United Nations*) menggunakan indeks pendidikan sebagai salah satu indikator pengukuran pengembangan kualitas sumber daya manusia (*Human Development Index*) untuk menentukan peringkat taraf pembangunan manusia suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinvestasi dalam bidang pendidikan sebagai salah satu upaya pembangunan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diuraikan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa “pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur”.

Investasi di bidang pendidikan untuk pembangunan bangsa tidak hanya sekadar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nasional, tetapi terlaksananya pendidikan nasional yang bermutu, baik dari segi input, proses, output, maupun outcome. Kehidupan masyarakat dan bangsa yang cerdas dapat diciptakan melalui pendidikan yang bermutu, begitupun sebaliknya, kehidupan masyarakat akan jauh dari standar bangsa yang cerdas dan berkualitas sebagai akibat dari pelaksanaan pendidikan yang tidak bermutu (Solihin, 2015). Kualitas input, proses, output, dan outcome merupakan komponen integral dari manajemen mutu pendidikan. Seluruh komponen tersebut saling berpengaruh satu sama lain dan menjadi indikator terhadap keberhasilan investasi di bidang pendidikan. Lulusan sebagai *output* dari pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi standar kompetensi lulusan, khususnya pada pendidikan menengah kejuruan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, lulusan pendidikan harus

mempunyai kriteria sebagai *outcomes*, yaitu mampu memenuhi kebutuhan pengguna lulusan dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan kejuruannya. Mutu lulusan menurut Immegart (1972) dirumuskan dalam bentuk dua aspek utama, yaitu: (1) sinergi dengan rumusan tujuan, kepentingan pimpinan sekolah, eksekutif, pendukung dan petugas sekolah, dan (2) sinergi dengan kepentingan rumusan pelanggan sekolah. Oleh karena itu, lulusan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, *stakeholder*, atau pengguna lulusan untuk mencapai keberhasilan investasi pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dunia industri sebagai pengguna lulusan sering kali tidak merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK, bahkan tidak menerima lulusan SMK dikarenakan kompetensi yang dimiliki lulusan belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi kebutuhan dari para pengguna lulusan. Daya serap lulusan SMK sampai saat ini dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator pengukuran keterserapan tenaga kerja oleh industri, dimana lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar dalam angka pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia berdasarkan pendidikan disajikan dalam Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Sakernas, 2024)

Gambar 1.1
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2021-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa SMK menyumbang angka pengangguran tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 11,13%. Meskipun dari tahun 2021 hingga 2023 angka pengangguran SMK mengalami penurunan, namun dalam rentang tahun tersebut SMK secara terus-menerus berada pada peringkat pertama penyumbang angka pengangguran diantara jenjang pendidikan lainnya, yaitu pada tahun 2021 sebesar 11,13%, tahun 2022 sebesar 9,42%, dan tahun 2023 sebesar 9,31%. Fenomena pengangguran ini disebabkan oleh adanya *missmatch* atau ketidaksesuaian antara SMK dengan standar kompetensi kerja dan industri (Ridwan, D & Dwiyanti, V., 2024). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Santoso (2014) yang menyatakan bahwa tingginya jumlah lulusan yang belum terserap industri disebabkan oleh mutu lulusan yang belum mencapai tingkat optimal.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan SMK dengan tujuan SMK dapat memprioritaskan keahlian lulusan agar siap bekerja secara profesional setelah lulus dari sekolah. Hingga tahun 2024, jumlah siswa SMK terus meningkat dibandingkan SMA, dimana rasio jumlah siswa SMK:SMA yaitu 49:51 per tahun ajaran 2024/2025. Akan tetapi, peningkatan pembangunan ini tidak disertai dengan penyerapan lulusan yang optimal. Rendahnya tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia kerja mencerminkan ketimpangan antara pertumbuhan kuantitas lembaga pendidikan kejuruan dan peningkatan kualitasnya (Santoso, 2014). Produktivitas pelaksanaan pembelajaran di SMK belum terlaksana secara optimal (Sobandi dkk., 2020).

Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) menunjukkan urgensi pengembangan program keahlian yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga kontekstual terhadap potensi lokal serta berorientasi pada keunggulan kompetitif nasional dan global. Menurut Tilaar (2002), pendidikan kejuruan yang efektif harus mampu menjawab tantangan industrialisasi dan perubahan struktural ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi SMK melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta kolaborasi dengan dunia industri menjadi strategi kunci dalam menghasilkan lulusan yang adaptif dan kompeten di pasar kerja global.

Isu pengangguran dan *missmatch* menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan belum sepenuhnya berhasil. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal ini karena peningkatan kualitas pendidikan sendiri merupakan persoalan kompleks yang menuntut keterpaduan seluruh subsistem, mencakup kualitas input, proses pembelajaran, fasilitas, serta sumber daya manusia dan pendukung lainnya (Suwatno dkk., 2012). Salah satu dari penyebab *missmatch* adalah dipengaruhi oleh *input* pendidikan itu sendiri (Santoso, 2016). Input pendidikan diantaranya terdiri dari kurikulum, perangkat ajar, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta hal lainnya memegang peran penting dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan aktual industri menjadi penyebab munculnya *missmatch* antara lulusan SMK dengan dunia industri (Ridwan, D., & Dwiyanti, V., 2024).

Dengan keberadaan *missmatch* yang masih terjadi hingga saat ini mencerminkan bahwa kurikulum hingga pembelajaran yang dilaksanakan di SMK saat ini belum terstandar, khususnya pada struktur materi pada pembelajaran kearsipan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Masalah *missmatch* atau ketidaksesuaian yang terjadi antara perkembangan pekerjaan di industri dengan struktur materi yang diajarkan di sekolah menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan di industri dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Apabila hal ini tidak terselesaikan, sulit bagi sekolah untuk meningkatkan keterserapan lulusan di industri. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya standarisasi materi dan model pembelajaran kearsipan sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gagasan pentingnya standarisasi materi dan model pembelajaran kearsipan di SMK.

Kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sebanyak 13 kali hingga saat ini yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan kurikulum bertujuan untuk membuat kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Setiyorini, S., & Setiawan, D., 2023). Perubahan kurikulum mulai tahun 1947 hingga saat ini, yaitu:

1. Rentjana Pelajaran (1947)
2. Rencana Pendidikan Sekolah Dasar (1964)
3. Kurikulum Sekolah Dasar (1968)
4. Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (1973)
5. Kurikulum Sekolah Dasar (1975)
6. Kurikulum 1984 (1984)
7. Kurikulum 1994 (1994)
8. Revisi Kurikulum 1994 (1997)
9. Rintisan KBK (2004)
10. Kurikulum KTSP (2006)
11. Kurikulum 2013 (2013)
12. Kurikulum Merdeka (2021)

Dalam konteks pembelajaran kearsipan, standar kurikulum dan pembelajaran masih menjadi tantangan. Dalam menjawab tantangan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan *Link and Match*. *Link and Match* merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka peningkatan relevansi SMK terhadap kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan industri pada khususnya. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengimplementasikan *Link and Match* adalah dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum atau penyusunan kurikulum bersama dengan dunia usaha dunia industri (DU/DI). Realita implementasi program ini pada satuan pendidikan belum berjalan secara optimal. Pada penyelenggarannya, program penyesuaian kurikulum antara SMK dengan industri hanya sebatas membahas kebutuhan industri secara global tanpa mengkaji substansi penyesuaian struktur materi secara komprehensif.

Kurikulum mata pelajaran kearsipan di SMK mengalami perubahan seiring dengan pergantian kepemimpinan negara yang diiringi juga dengan pergantian kementerian pendidikan. Dalam perubahan pergantian kementerian pendidikan saat ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memperkenalkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang telah diterapkan saat ini tidak ada perubahan, namun terdapat

perubahan pendekatan baru dalam penyelenggaraan kurikulum, yaitu pendekatan *Deep Learning*.

Pendekatan *Deep Learning* berfokus pada pemahaman yang mendalam dan pengaplikasian konsep yang lebih baik. Dilansir dari laman Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Abdul Mu'ti dalam Seminar yang bertajuk “Implementasi *Deep Learning* dalam Rangka Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, mengatakan bahwa “*Deep learning bukan sekedar menghafal atau mengerjakan soal-soal ujian, tetapi bagaimana siswa memahami konsep secara menyeluruh, mengaitkannya dengan disiplin ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata*”. Selain itu, pendekatan *deep learning* diharapkan dapat membantu peningkatan pendidikan di Indonesia, adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menciptakan generasi yang memiliki daya pikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik.

Abdul Mu'ti juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan keunggulan dari pendekatan *deep learning*, yaitu “*Deep learning mengutamakan proses berpikir tingkat tinggi, seperti problem solving, kolaborasi, dan menemukan makna. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan ini akan mendorong siswa untuk terus berpikir kritis, menggali pengetahuan, dan pada akhirnya dapat menghubungkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata*”.

Konsep *Deep Learning* diterapkan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pilar utama dalam konsep ini yaitu (1) *Mindful Learning*; metode belajar yang mendorong siswa untuk sepenuhnya hadir dan terlibat dalam proses pembelajaran; (2) *Meaningful Learning*; proses pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpikir dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan belajar; dan (3) *Joyful Learning*; pendekatan pembelajaran yang mengombinasikan dengan hal menyenangkan dapat melekat lebih lama dibandingkan pembelajaran yang disampaikan secara monoton saja.

Ditinjau dari tiga kali pergantian kurikulum terakhir, yaitu kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam penyajian materi dan standar kompetensi dalam bidang kearsipan.

Konten pembelajaran kearsipan dalam kurikulum terbaru menunjukkan pendekatan yang berbasis teknologi dan digitalisasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Perubahan konten kurikulum kearsipan mulai dari Kurikulum KTSP hingga Kurikulum Merdeka dapat terlihat pada Kompetensi Dasar yang disajikan pada Gambar 1.2, Gambar 1.3, dan Gambar 1.4.

DASAR KOMPETENSI KEJURUAN DAN KOMPETENSI KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI KEAHLIAN : ADMINISTRASI KOMPETENSI KEAHLIAN : ADMINISTRASI PERKANTORAN (118)	
7. Mengelola sistem kearsipan	7.1 Menentukan sistem kearsipan 7.2 Menentukan kebutuhan alat dan bahan kearsipan 7.3 Mengimplementasikan sistem kearsipan 7.4 Memelihara sistem kearsipan.

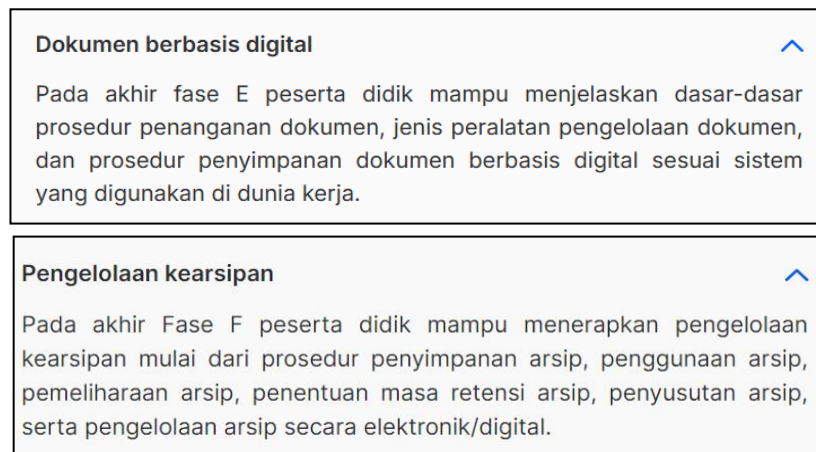
Sumber: Muhidin, S. (2024)

Gambar 1.2
Kurikulum KTSP Dasar Kompetensi Mata Pelajaran Kearsipan

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami arsip dan kearsipan	4.1 Melakukan pengelompokkan arsip dan kearsipan
3.2 Memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan	4.2 Melakukan pengelompokkan norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan
3.3 Menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan	4.3 Menggunakan peralatan kearsipan
3.4 Menerapkan penanganan surat masuk	4.4 Melakukan penanganan surat masuk
3.5 Menerapkan penanganan surat keluar	4.5 Melakukan penanganan surat keluar
3.6 Menerapkan klasifikasi dan indeks arsip	4.6 Melaksanakan klasifikasi dan indeks arsip
3.7 Menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek.	4.7 Melakukan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek)
3.8 Menerapkan penggunaan arsip	4.8 Melaksanakan prosedur penggunaan arsip
3.9 Menerapkan pemeliharaan arsip	4.9 Melakukan pemeliharaan arsip
3.10 Mengevaluasi arsip dalam rangka menentukan retensi arsip	4.10 Melakukan penentuan masa retensi arsip
3.11 Menerapkan penyusutan arsip	4.11 Melakukan penyusutan arsip
3.12 Menerapkan pengelolaan arsip elektronik	4.12 Melakukan pengelolaan arsip elektronik
3.13 Mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip	4.13 Membuat laporan hasil evaluasi kegiatan pengelolaan arsip

Sumber: Muhidin, S. (2024)

Gambar 1.3
Kurikulum 2013 Dasar Kompetensi Mata Pelajaran Kearsipan



Sumber: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemedikbudristek (2022)

Gambar 1.4

Kurikulum Merdeka Dasar Kompetensi Mata Pelajaran Kearsipan

Dalam kurikulum KTSP (Gambar 1.2) menunjukkan konten yang lebih sistematis dengan kurikulum yang terstruktur, sementara Kurikulum 2013 lebih fleksibel tetapi masih memiliki keterikatan pada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Sementara itu, Kurikulum Merdeka menyediakan bahan lebih ringkas dan berorientasi pada kebebasan guru dalam menentukan metode pembelajaran. Namun, perubahan ini berisiko menyebabkan kurangnya pemahaman bagi guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.

Menurut Majid (2014) perubahan kurikulum yang terlalu sering tanpa adanya pelatihan yang memadai bagi pendidik dapat menyebabkan kesenjangan pemahaman dalam implementasi pembelajaran di kelas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sagala (2017) yang menyebutkan bahwa Kurikulum 2013 memang lebih menekankan pada pendekatan saintifik, tetapi dalam praktiknya masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun modul yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di lain sisi, kualitas proses pembelajaran, termasuk di dalamnya yaitu kualitas mengajar guru berpengaruh terhadap kualitas kompetensi lulusan (Imaniyati & Santoso, 2018). Guru berperan penting dalam merencanakan proses pembelajaran, melakukan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran (Sobandi dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Komara dkk. (2024) menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru dalam

menentukan metode pembelajaran, tetapi di sisi lain, tanpa adanya standar yang baku dalam pembelajaran kearsipan, terdapat risiko terjadinya perbedaan pemahaman antar sekolah. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada kompetensi lulusan SMK yang tidak seragam, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam dunia kerja.

Pengembangan kurikulum kearsipan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada umumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengatur prinsip dasar pengelolaan arsip, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Apabila ditinjau lebih dalam dari aspek pengembangan materi dan modul pembelajaran, konten yang disampaikan dalam kurikulum SMK masih belum sepenuhnya mencakup standar yang telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penting dalam pengelolaan arsip, seperti penciptaan arsip, instrumen pengelolaan arsip (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan arsip) yang belum dibahas secara mendalam dalam modul pembelajaran. Sedangkan aspek-aspek ini merupakan fondasi utama dalam praktik kearsipan di dunia industri maupun instansi pemerintahan (Sugiarto, 2021). Modul pembelajaran kearsipan SMK MPLB disajikan lebih lengkap pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Alur Tujuan dan Kriteria Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Kearsipan

Fase	Elemen	Tujuan Pembelajaran	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)	Jumlah Jam Pelajaran
Fase E	Dokumen berbasis digital	5.1 Dasar- dasar prosedur penanganan dokumen	1. Menjelaskan pengertian dokumen 2. Mengidentifikasi jenis-jenis dokumen 3. Menguraikan prosedur surat	12 JP

Fase	Elemen	Tujuan Pembelajaran	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)	Jumlah Jam Pelajaran
Fase E	Dokumen berbasis digital		masuk/keluar 4. Menerapkan prosedur surat masuk/keluar	
		5.2 Prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai sistem yang digunakan di dunia kerja	1. Menjelaskan pengertian penyimpanan dokumen berbasis digital 2. Mengidentifikasi jenis penyimpanan dokumen (pengenalan 5 sistem kearsipan) 3. Menerapkan penyimpanan dokumen digital berdasarkan sistem masalah (yang berhubungan dengan pelajaran)	24 JP
Fase F	Pengelolaan Kearsipan	4.1 Menerapkan pengelolaan kearsipan	1. Menerapkan prosedur penyimpanan arsip 2. Menerapkan prosedur penggunaan arsip 3. Menerapkan	60 JP

Fase	Elemen	Tujuan Pembelajaran	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)	Jumlah Jam Pelajaran
Fase F	Pengelolaan Kearsipan		prosedur pemeliharaan arsip 4. Menentukan masa retensi arsip 5. Menerapkan prosedur penyusutan arsip	
		4.2 Menerapkan pengelolaan arsip elektronik/digital	1. Mendeskripsikan konsep arsip elektronik 2. Mendeskripsikan proses pengelolaan arsip elektronik 3. Menerapkan prosedur pengelolaan arsip elektronik	18 JP

Sumber: SMK Negeri 3 Bandung (2024)

Modul pembelajaran kearsipan di SMK terdiri atas dua fase utama, yaitu Fase E (Dokumen Berbasis Digital) dan Fase F (Pengelolaan Kearsipan), yang dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam pengelolaan dokumen dan arsip, baik secara konvensional maupun digital. Pada Fase E, materi berfokus pada prosedur penanganan dokumen serta penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai dengan sistem yang digunakan di dunia kerja. Siswa diajarkan mengenai konsep dasar dokumen, jenis-jenis dokumen, serta prosedur pengelolaan surat masuk dan keluar. Selain itu, dikenalkan dengan konsep penyimpanan arsip digital serta lima sistem kearsipan yang umum digunakan. Namun, dengan alokasi waktu 36 Jam Pelajaran (JP), cakupan materi masih

terbatas dan belum mengakomodasi aspek krusial seperti standarisasi penciptaan arsip, tata naskah dinas, serta sistem keamanan arsip elektronik, yang memiliki peran penting dalam administrasi perkantoran modern.

Pada Fase F, pembelajaran lebih difokuskan pada pengelolaan kearsipan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Materi yang diajarkan mencakup prosedur penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip dengan alokasi waktu 60 JP. Selain itu, siswa juga dikenalkan dengan arsip elektronik, termasuk konsep serta prosedur pengelolaannya. Meskipun jumlah jam pelajaran lebih banyak dibandingkan dengan Fase E, beberapa aspek fundamental dalam regulasi kearsipan, seperti klasifikasi arsip, penyusunan jadwal retensi arsip yang lebih mendetail, serta sistem klasifikasi keamanan kearsipan, masih belum tersaji secara komprehensif dalam modul ini.

Ditinjau dari aspek kognitif, modul yang dikembangkan perlu berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) agar dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. HOTS mencakup tiga tingkatan tertinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6), yang memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami dan menerapkan konsep tetapi juga mengembangkan solusi inovatif dalam pengelolaan arsip. Implementasi HOTS dalam pembelajaran sangat penting karena menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang kearsipan yang kini bertransformasi ke sistem digital.

Sementara itu, apabila dianalisis berdasarkan modul yang telah dikembangkan, KKTP dalam modul ini dapat diklasifikasikan berdasarkan taksonomi Bloom. Tabel 1.2 menyajikan pemetaan capaian pembelajaran ke dalam tingkatan taksonomi Bloom untuk melihat distribusi tingkat kognitif yang dicapai peserta didik dalam model pembelajaran kearsipan.

Tabel 1.2
Hasil Analisis Distribusi Aspek Kognitif melalui Taksonomi Bloom pada
KKTP Modul Pembelajaran Kearsipan

No.	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)	Kategori
1.	Menjelaskan pengertian dokumen	C2 (<i>Understanding</i>)
2.	Mengidentifikasi jenis-jenis dokumen	C2 (<i>Understanding</i>)
3.	Menguraikan prosedur surat masuk/keluar	C2 (<i>Understanding</i>)
4.	Menerapkan prosedur surat masuk/keluar	C3 (<i>Applying</i>)
5.	Menjelaskan pengertian penyimpanan dokumen berbasis digital	C2 (<i>Understanding</i>)
6.	Mengidentifikasi jenis penyimpanan dokumen	C2 (<i>Understanding</i>)
7.	Menerapkan penyimpanan dokumen digital berdasarkan sistem masalah	C3 (<i>Applying</i>)
8.	Menerapkan prosedur penyimpanan arsip	C3 (<i>Applying</i>)
9.	Menerapkan prosedur penggunaan arsip	C3 (<i>Applying</i>)
10.	Menerapkan prosedur pemeliharaan arsip	C3 (<i>Applying</i>)
11.	Menentukan masa retensi arsip	C5 (<i>Evaluating</i>)
12.	Menerapkan prosedur penyusutan arsip	C3 (<i>Applying</i>)
13.	Mendeskripsikan konsep arsip elektronik	C2 (<i>Understanding</i>)
14.	Mendeskripsikan proses pengelolaan arsip elektronik	C2 (<i>Understanding</i>)

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis taksonomi Bloom, capaian pembelajaran dalam modul ini masih didominasi oleh kategori C2 (Memahami) dan C3 (Menerapkan) dengan masing-masing 46,7% dari total capaian. Sementara itu, kategori C5 (Mengevaluasi) hanya memiliki 6,7%, dan tidak terdapat KKTP pada kategori C1 (Mengingat), C4 (Menganalisis), maupun C6 (Menciptakan). Hal ini menunjukkan bahwa modul masih berfokus pada tingkat pemahaman dan penerapan konsep, namun belum mengoptimalkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS),

seperti analisis, evaluasi, dan penciptaan. Hal ini didukung hasil penelitian oleh Putri & Suwatno, 2018 terhadap siswa SMK dimana hasil menunjukkan bahwa rata-rata siswa tidak bisa menjawab soal C4, C5, dan C6, yang merupakan ranah kognitif *High Order Thinking Skill* (HOTS) yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis. Menurut Wahyudi & Suwatno (2020) keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan belajar.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, terdapat kesenjangan antara materi yang diajarkan dalam modul dengan standar regulasi yang berlaku. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur seluruh tahapan dalam siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip, baik dalam konteks arsip dinamis maupun statis. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian materi modul dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009, berikut disajikan Tabel 1.3 perbandingan antara isi modul dan standar regulasi kearsipan yang berlaku.

Tabel 1.3
Analisis Presentase Kesesuaian Materi Pembelajaran Kearsipan dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

No.	Aspek Pengelolaan Arsip	Standar Sesuai UU No. 43 Tahun 2009	Presentase Kesesuaian
Instrumen Kearsipan			
1.	Tata Naskah Dinas	Mencakup pedoman pembuatan, format, serta penggunaan surat/dokumen resmi	40%
2.	Klasifikasi Arsip	Mencakup sistem pengelompokan arsip berdasarkan kategori dan kepentingan	70%
3.	Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Mencakup kebijakan penyimpanan dan pemusnahan arsip berdasarkan kategori	30%

No.	Aspek Pengelolaan Arsip	Standar Sesuai UU No. 43 Tahun 2009	Presentase Kesesuaian
4.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)	Mencakup tingkat keamanan arsip berdasarkan kepentingan dan aksesibilitas	0%
Arsip dinamis			
1.	Penciptaan Arsip	Mencakup proses penciptaan dokumen/arsip resmi, tata naskah dinas, autentikasi	70%
2.	Penggunaan Arsip	Mencakup aksesibilitas dan alur penggunaan arsip di instansi pemerintah/swasta	80%
3.	Pemeliharaan Arsip	Mencakup metode perawatan, perbaikan, perlindungan dari kerusakan	70%
4.	Penyusutan Arsip	Mencakup tahapan penyusutan: retensi, pemusnahan, dan penyelamatan arsip	60%
Arsip statis			
1.	Akuisisi Arsip Statis	Mencakup prosedur pengambilan atau penyerahan arsip statis oleh lembaga kearsipan	0%
2.	Pengelolaan Arsip Statis	Mencakup penataan, deskripsi, dan klasifikasi arsip statis	0%
3.	Preservasi Arsip Statis	Mencakup pelestarian fisik dan digital arsip	0%
4.	Akses Arsip Statis	Mencakup prosedur akses publik terhadap arsip statis	0%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat kesesuaian materi dalam modul pembelajaran kearsipan di SMK dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa aspek telah

tercakup dalam modul, namun belum secara menyeluruh. Instrumen kearsipan, seperti Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA), telah diajarkan, meskipun dengan cakupan yang masih terbatas. Sementara itu, aspek Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) sama sekali tidak dibahas, sementara hal tersebut memiliki peran penting dalam perlindungan informasi arsip.

Hasil analisis kesesuaian modul pembelajaran kearsipan dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menunjukkan bahwa beberapa aspek pengelolaan arsip belum sepenuhnya diajarkan di SMK. Untuk memahami dampaknya terhadap kesiapan siswa dalam dunia kerja, dilakukan survei terhadap 10 siswa yang telah melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin) guna mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi kearsipan yang dibutuhkan di industri. Hasil survei diuraikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Hasil Survei Pemahaman Siswa yang telah Melaksanakan Prakerin terhadap Materi Pembelajaran Kearsipan SMK

No.	Aspek Pengelolaan Arsip	Paham	Kurang Paham	Tidak Tahu
1.	Dasar-dasar Prosedur Penanganan Dokumen	30%	50%	20%
2.	Prosedur Surat Masuk/Keluar	20%	60%	20%
3.	Penyimpanan Dokumen Digital	20%	50%	30%
4.	Pengelolaan Arsip Statis	0%	20%	80%
5.	Pengelolaan Arsip Dinamis	30%	50%	20%
6.	Tata Naskah Dinas	10%	30%	60%
7.	Klasifikasi Arsip	10%	20%	70%
8.	Jadwal Retensi Arsip	0%	20%	80%
9.	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip	0%	10%	90%
10.	Pemeliharaan Arsip	5%	20%	75%
11.	Penyusutan Arsip	0%	15%	85%

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 1.4 menyajikan hasil survei yang menggambarkan seberapa jauh siswa memahami aspek-aspek penting dalam pengelolaan arsip, termasuk arsip dinamis, arsip statis, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis. Data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep utama, terutama terkait arsip statis, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan, dan penyusutan arsip, yang memiliki persentase ketidaktahuan di atas 70%. Bahkan pada aspek pengelolaan arsip statis, sistem keamanan arsip, serta penyusutan arsip hampir tidak diketahui oleh siswa. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan di sekolah dengan kompetensi yang diperlukan dalam industri. Kurangnya pemahaman aspek fundamental dalam pengelolaan arsip dapat berdampak pada kesiapan kerja siswa, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan di instansi

Aktualitas permasalahan dalam pembelajaran kearsipan di SMK semakin terlihat kompleks akibat adanya perbedaan kurikulum, minimnya standarisasi dalam pengajaran, serta kesenjangan yang signifikan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Kurikulum yang terus berkembang belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga lulusan SMK masih menghadapi kendala dalam menerapkan kompetensi kearsipan di dunia kerja. Selain itu, keterbatasan akses terhadap materi pembelajaran berbasis industri semakin memperlebar kesenjangan ini, yang berdampak pada rendahnya kesiapan siswa dalam menjalankan tugas-tugas kearsipan secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan berbasis industri guna meningkatkan relevansi materi dengan tuntutan dunia kerja.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada model pendekatan pengelolaan arsip *The Life-Cycle Records* (Read & Ginn, 2010) yang mengacu pada tahapan utama dalam pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Model ini menjadi dasar dalam menstandarisasi pembelajaran kearsipan di SMK agar selaras dengan kebutuhan industri dan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini

menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana standar pembelajaran dapat dikembangkan agar sesuai dengan siklus hidup arsip dan memenuhi standar nasional (UU No. 43 Tahun 2009) serta internasional (ISO 15489:2016).

Pemilihan ISO 15489:2016 *Records Management* sebagai standar acuan dalam penelitian ini didasarkan pada sifatnya yang berskala internasional dan bersifat komprehensif dalam mengatur prinsip, kebijakan, serta praktik pengelolaan arsip. Standar ini tidak hanya mengatur aspek teknis penciptaan, klasifikasi, penggunaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola arsip yang terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, ISO 15489:2016 dapat dijadikan sebagai rujukan, tidak hanya dalam pengembangan materi dan model pembelajaran kearsipan di SMK tetapi juga mendorong sekolah agar mengembangkan dan menerapkan Manajemen Kearsipan Sekolah yang terstandar.

Selain itu, perkembangan praktik di lapangan menunjukkan bahwa berbagai lembaga pemerintah, organisasi publik, dan sektor industri di Indonesia telah mulai menerapkan standar ISO 15489:2016 dalam manajemen arsip, khususnya dalam konteks pengelolaan arsip digital. Fenomena ini menegaskan adanya kebutuhan agar sekolah, terutama SMK program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB), melakukan penyesuaian dan penguatan kurikulum pembelajaran kearsipan agar selaras dengan praktik terbaik yang berlaku di dunia kerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan lulusan SMK tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan standar nasional, melainkan juga berdaya saing global melalui penguasaan standar internasional yang saat ini telah menjadi acuan utama dalam manajemen arsip profesional.

Penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara struktur materi dan model pembelajaran kearsipan yang digunakan saat ini dengan kajian model *The Life-Cycle Records*. Dengan memahami proses pengelolaan arsip berdasarkan tahapan siklus hidupnya, diharapkan model pembelajaran yang dikembangkan dapat lebih komprehensif dalam membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali

perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, serta praktisi industri, guna memastikan bahwa standar pembelajaran yang dikembangkan benar-benar aplikatif dan sesuai dengan realitas kerja. Harapannya adalah lulusan SMK memiliki kompetensi yang lebih relevan, tidak hanya dalam memahami konsep kearsipan, tetapi juga dalam mengimplementasikan keterampilan pengelolaan arsip secara profesional, sesuai dengan standar pengelolaan arsip, baik secara nasional maupun internasional.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah difokuskan pada aspek standarisasi model pembelajaran kearsipan di SMK Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) di Kota Bandung. Standarisasi dalam kurikulum pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti kompetensi pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem evaluasi, kebijakan pemerintah, dan variabel lainnya. Namun, penelitian ini tidak mencakup semua indikator tersebut, melainkan secara spesifik berfokus pada analisis model pembelajaran yang mengacu pada standar pengelolaan arsip secara nasional (UU No. 43 Tahun 2009) dan standar internasional (ISO 15489:2016).

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan materi dan model pembelajaran kearsipan yang terstruktur, sesuai dengan prinsip pengelolaan arsip, serta relevan dengan kebutuhan industri dan regulasi yang berlaku. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model pembelajaran yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret dalam menyusun materi dan model pembelajaran yang lebih sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, penerapan model pembelajaran kearsipan yang terstandar juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan dengan membekali siswa keterampilan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern dalam bidang kearsipan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di paparkan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah materi pembelajaran kearsipan di sekolah sudah sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?
2. Bagaimana materi pembelajaran kearsipan di sekolah yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?
3. Apakah model pembelajaran kearsipan di sekolah sudah sesuai dengan materi pembelajaran kearsipan yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?
4. Bagaimana model pembelajaran kearsipan di sekolah sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran kearsipan yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi materi dan model pembelajaran kearsipan sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?
6. Strategi apa yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesesuaian pembelajaran kearsipan di SMK MPLB Kota Bandung dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*?

1.4 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kearsipan di SMK MPLB Kota Bandung sudah terstandarisasi dan

mengembangkan materi dan model pembelajaran kearsipan yang terstandarisasi UU No. 43 Tahun 2009 dan ISO 15489:2016.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kesesuaian materi kearsipan di sekolah dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*.
2. Untuk menganalisa dan mengembangkan materi pembelajaran kearsipan di sekolah yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*.
3. Untuk mengetahui kesesuaian model pembelajaran kearsipan di sekolah dengan materi pembelajaran kearsipan yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*.
4. Untuk menganalisa dan mengembangkan model pembelajaran kearsipan di sekolah sesuai dengan materi pembelajaran kearsipan yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi standarisasi materi dan model pembelajaran kearsipan sesuai dengan standar pengelolaan arsip menurut UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management* di SMK Negeri MPLB Kota Bandung.
6. Untuk menganalisa dan mengembangkan strategi dalam meningkatkan kesesuaian standarisasi model pembelajaran kearsipan di SMK Negeri MPLB Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini agar nantinya dapat memberikan manfaat maupun menambah wawasan yang luas mengenai standarisasi model pembelajaran kearsipan di SMK Negeri MPLB di Kota

Bandung berdasarkan UU No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan ISO 15489:2016 *Records Management*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, di antaranya yaitu:

1. Bagi Siswa diharapkan hasil dari penelitian ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kearsipan di kelas dan menambah wawasan dalam konsep serta praktik kearsipan di industri.
2. Bagi Sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memperkuat dukungan kelembagaan melalui revisi kebijakan, penyusunan program strategis, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses standarisasi materi dan model pembelajaran kearsipan agar selaras dengan regulasi nasional maupun standar internasional.
3. Bagi Guru diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembelajaran lebih seragam, tepat sasaran, dan inovatif, terutama dalam pembelajaran yang dapat mendukung keaktifan siswa pada program keahlian Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis.
4. Bagi Peneliti diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bekal bagi peneliti untuk menjadi calon guru yang profesional di kemudian hari.